

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelahiran Partai Amanat Nasional diawali dari Majelis Amanat Rakyat atau MARA yang memiliki peran besar dalam menumbangkan rezim orde baru dan menghasilkan buah reformasi. Beberapa tokoh yang berperan dalam gerakan yang dilakukan oleh MARA akhirnya menghimpun diri untuk melanjutkan perjuangan mereka melalui sebuah partai diantaranya ada Amien Rais, Daniel Sparingga, Gunawan Muhammad, Toety Heraty, Arifin Panigoro, dan Faisal Basri, Rizal Ramli, Albert Hasibuan.¹ Akhir pemerintahan di era Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 di Indonesia menandai awal dari periode Reformasi yang melibatkan perubahan sistem politik dan birokrasi negara secara menyeluruh. Para tokoh penting tersebut merupakan pendukung reformasi dimana mereka meyakini bahwa diperlukan sistem dan pelaku baru yang mampu membawa perubahan riil demi kepentingan publik.

Mereka ingin melihat pemerintahan yang lebih *akuntabel*, demokratis, dan terbuka, serta birokrasi yang efisien dan profesional. Selain itu, mereka mengadvokasi untuk pemenuhan hak asasi manusia yang lebih baik, pencegahan korupsi, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi ini menghasilkan berbagai perubahan kelembagaan dan regulasi penting. Misalnya, proses demokratisasi dimulai dengan pemilihan presiden dan legislatif yang lebih bebas dan adil. Lembaga-lembaga anti-korupsi didirikan untuk memerangi korupsi dalam pemerintahan dan sektor publik. Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers menjadi lebih dihargai dan dilindungi. pembatasan ataupun penyederhanaan hak berpolitik juga mewarnai dinamika Orde Baru. Partai politik era Orde Lama sangat banyak, kini disederhanakan di mana ada sekitar 10 partai politik kemudian diwujudkan hanya menjadi tiga yaitu Partai Demokrasi Indonesia sebagai representasi kaum Nasionalis, Partai Persatuan Pembangunan sebagai representasi kaum Islam sementara yang satu adalah Golongan Karya untuk kalangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Peristiwa tersebut merupakan tonggak awal penguncian hak

¹ P Fitria, *Kamus Sejarah Dan Budaya Indonesia*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2023), 140.

berpolitik umat Islam kemudian pasca reformasi kran tersebut dibuka yang menghasilkan partai-partai Islam bermunculan.²

Keberadaan partai politik Islam di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga model yang berbeda. Pertama, ada partai politik Islam yang dengan jelas mencantumkan asas dan ideologi Islam secara lugas di dalam anggaran dasarnya. Kedua, terdapat partai politik Islam yang menggunakan atribut dan simbol yang secara khusus terkait dengan Islam, seperti bulan, bintang, Ka'bah, dan tulisan Arab, namun mereka tidak secara *eksplisit* mencantumkan Islam dalam asas partainya. Mereka juga mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, terdapat partai politik Islam yang tidak menggunakan atribut dan simbol Islam, meskipun mayoritas pemilihnya adalah umat Islam. Partai-partai ini menggabungkan ideologi Islam dengan ideologi non-Islam.³

Salah satu Partai Islam adalah Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki komitmen dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dan mewakili kepentingan umat Islam di dalam sistem politik. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa Partai Amanat Nasional juga mengakui Pancasila sebagai dasar negara.⁴ Mereka memahami bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman agama dan keyakinan, dan dengan mengakui Pancasila, mereka dapat menjaga harmoni antara Islam dan nilai-nilai nasional yang lainnya. Dengan demikian, partai ini tidak hanya fokus pada agenda Islam, tetapi juga berusaha menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat non-Islam.

PAN dipengaruhi oleh gabungan ideologi Islam dengan poin-poin program lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pembangunan nasional.⁵ Dengan memperhatikan isu-isu ini, partai berhasil memperluas basis pemilihnya, tidak hanya terbatas pada umat Islam, tetapi juga

² Rofiq Mahfudz, *Begawan Politik: Pergulatan Politik Kiai dalam Misi Keumatan, Kemandirian, dan Kesejahteraan*, (JI. Totem VI B9 No. 22 Kel. Sadeng, Kec. Gunungpati, Semarang Jawa Tengah: CV Lawwana April 2023), 58.

³ Saputra, *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 44.

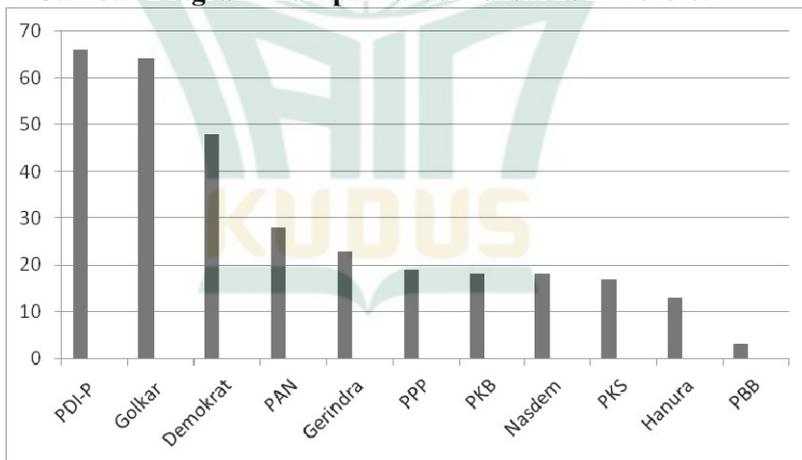
⁴ Muchammad Miqdad and Mudiwati Rahmatunnisa, 'Branding Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Barat di Instagram Menjelang Pemilu 2024', 2.3 (2024), 112–18 <<https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i3.44090>>.

⁵ Ali Thaufan Dwi Saputra, *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 30.

menarik perhatian pemilih dari berbagai latar belakang agama. Dengan demikian, Partai Amanat Nasional memiliki peranan penting sebagai partai Islam dalam meraih suara di Indonesia. Mereka membawa narasi agama dan nilai-nilai Islam dalam platform politik mereka, namun tetap menghormati keragaman agama dan menjaga harmoni dengan nilai-nilai nasional yang diwakili oleh Pancasila.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwasanya Partai Amanat Nasional tergolong dalam klasifikasi partai Islam yang berbasis pada suara umat Islam. Sekalipun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional tidak secara lugas mencantumkan nilai-nilai Islam. Representasi nilai-nilai yang diyakini oleh suatu kelompok menjadi kesepakatan bersama, di dalam internal ruang lingkup kelompok tersebut karena adanya aturan yang mengikat ditujukan untuk mempermudah mencapai suatu visi dari kelompok tersebut.⁶ Tapi tidak bisa dipungkiri melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional baik kader ataupun simpatisan dan kepengurusan, mereka semua terikat erat dengan aturan main partai tersebut. Sehingga mereka mau atau tidak harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang sudah ada di dalam Partai Amanat Nasional.

Gambar Diagram Korupsi Partai Politik 2011-2023 0.1



Data di atas merupakan partai politik yang tersandung kasus berdasarkan jumlah kasus korupsi baik gratifikasi maupun penyuapan. Pertama partai PDIP dengan jumlah kasus sebanyak 66,

⁶ Rizqo Dzulqornain Ridho Hadi Nurriszky, "Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung" February (2022).

yang disusul oleh Golkar diposisi kedua dengan jumlah kasus 64, selanjutnya di posisi ketiga ada Demokrat dengan jumlah kasus 48, posisi keempat ada PAN dengan jumlah kasus sebanyak 28, posisi kelima ada Gerindra dengan jumlah kasus 23, posisi ke enam ada PPP dengan jumlah kasus 19 posisi ketujuh ada PKB dengan jumlah total 18, di posisi kedelapan ada Nasdem dengan jumlah kasus sama yaitu 18, posisi kesembilan ada PKS dengan jumlah kasus sebanyak 17, posisi kesepuluh ada Hanura dengan 13 kasus dan yang terakhir posisi kesebelas ada PBB dengan jumlah kasus 3⁷.

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya kaderisasi sebaik apapun tidak menjadi garansi terhadap anggota Partai politik, Partai Amanat Nasional sendiri yang telah menjabarkan etika politik yang sedemikian rupa dalam ad/art-nya yang kemudian ditopang dalam ranah kaderisasi masuk jajaran 4 besar kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pentingnya kesadaran menjadi tonggak utama dalam memahami terhadap anggota Partai politik nilai-nilai yang dijunjung.

Penelitian terdahulu karya Ahmad Solihin dengan judul "Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan partai politik di Indonesia" mengatakan bahwasanya hubungan Partai Amanat Nasional dan Muhammadiyah merupakan pernikahan *mut'ah* atau kawin kontrak, banyak persepsi mengatakan bahwasanya PAN adalah partai Muhammadiyah. Menurut Haider Natsir dalam karya Al-Hamdi yang berjudul Paradigma Politik Muhammadiyah hubungan antara partai amanat nasional dan Muhammadiyah itu tidak lebih dari moral politik dan *historis*, beliau juga menekankan bahwasanya prinsip utama antara Partai Amanat Nasional dan Muhammadiyah tidak jauh beda dengan partai politik lainnya di luar kan yang memiliki sifat kelonggaran dan tidak memiliki tuntutan yang mengikat.⁸

PAN Sebagai partai Islam, kerap kali memiliki kepentingan yang mengakomodir umat Islam berikut diantaranya, PAN secara tegas melalui Zulkifli Hasan selaku ketua umum DPP menolak peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 tentang minuman keras. Selanjutnya PAN berharap melalui Bank Syariah Indonesia menjadi

⁷Aditya dan Farid, "Menilik Jumlah Kasus dan Nominal Korupsi Parpol Peserta Pemilu 2024" <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/15/090000165/menilik-jumlah-kasus-dan-nominal-korupsi-parpol-peserta-pemilu-2024> 15 September 2023, 09.00 WIB.

⁸ Al-Hamdi, *Paradigma Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 376.

salah satu opsi pemulihan ekonomi nasional hal ini diutarakan oleh anggota komisi 6 DPR RI Abdul Hakim Bafagih. PAN juga menyuarakan keluhan dari tenaga *honorer* untuk diangkat menjadi PNS hal ini diutarakan oleh Guspari Gaus saat melakukan reses di Pasaman Barat Sumatera Barat.⁹ Dilihat dari beberapa sikap Partai Amanat Nasional itu sudah merepresentasikan tentang nilai-nilai keagamaan yang mengkerucut kepada etika dari sini kita melihat perjuangan Partai Amanat Nasional bukan hanya sekedar berada di dalam aturan Anggaran Dasar (AD) anggaran Rumah Tangga (ART).

Salah satu hal yang menarik yang dapat kita teliti dari pemaparan fakta-fakta sosial yang terdapat dalam Partai Amanat Nasional yaitu tentang etika partai. Secara normatif partai ini sangat menjunjung etika, yang dilandasi oleh dasar agama maka dari itu dalam penelitian kali ini saya akan mencoba untuk melihat lebih jauh bagaimana penerapan etika politik Partai Amanat Nasional yang dilandasi oleh agama melalui kacamata Al-Farabi. Di mana kita mengetahui Al-Farabi salah satu tokoh pemikir muslim yang memiliki fokus kajian dalam tatanan politik Islam yang di mana etika politik islam merupakan salah satu gagasannya.¹⁰ Pandangan Al-Farabi tentang etika politik didasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka manusia harus memiliki satu suatu tatanan yang dapat mengatur antara satu dengan yang lainnya.

Al-Farabi menduduki posisi yang istimewa di kalangan filosof Muslim karena pemikirannya yang masih mempengaruhi pemikiran filsafat *paripatetik* lainnya. Massignon mengakui bahwa al-Farabi adalah pemikir Muslim pertama yang setiap kalimatnya memiliki makna yang dalam.¹¹ Al-Farabi juga diakui sebagai ahli dalam ilmu logika, menjadi pondasi bagi semua cabang ilmu, khususnya filsafat dan mantiq/logika yang dikembangkan oleh Aristoteles. Dia bahkan melampaui gurunya, Abu Bisyr Matta bin Yunus, yang pada saat itu merupakan tokoh terkenal di bidang logika di Baghdad. Al-Farabi juga dianggap sebagai filosof terbesar setelah filosof Yunani, karena

⁹ Komarudin, “Kolom berita Partai Amanat Nasional.” <https://pan.or.id/2021/03/09/pan-harap-bank-syariah-indonesia-jadi-leading-sector-pemulihan-ekonomi-nasional/#>, Diakses pada tanggal 12, November 2023, pukul 05.10 WIB

¹⁰ Hesti Pancawati, “Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik dan Negara,” *Aqlania* 9, no. 1 (2018): 73–110, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2063>.

¹¹ M Wiyono et al., “Pemikiran Filsafat Al-Farabi” 18, no. April (2016): 67–80.

berhasil menggabungkan pemikiran Aristoteles dan *Neo-Platonis*. Keahliannya dalam merumuskan aturan-aturan pengetahuan filsafat juga diapresiasi.¹²

Pemahaman secara umum, etika sering kali dikaitkan dengan masalah moral. Menurut pemikiran Immanuel Kant, dalam jurnal *Patologi Pembangunan Etika Politik Pascareformasi Dalam Perspektif Postrukturalis-Hipersimeotik* karya Darsono dan Clara, moralitas terkait dengan memiliki kehendak yang baik atau kehendak kebaikan. Pemahaman Kant ini menyiratkan bahwa seseorang yang sedang berada dalam keadaan baik berdasarkan faktor seperti bakat atau kekayaan, namun tidak didasarkan pada kehendak kebaikan, tidak dapat disebut sebagai sesuatu yang memiliki moralitas.¹³ Contohnya, jika seorang politikus memberikan sejumlah uang kepada pendukungnya dengan menyebutnya sebagai "kehormatan", dimana tujuannya adalah untuk mencapai citra yang baik dan di balik itu semua terdapat strategi politik, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kehendak yang baik.

Etika politik melibatkan tiga dimensi yang saling terkait, yaitu tujuan politik, pilihan sarana yang digunakan, dan perilaku politikus. Tujuan politik mengacu pada hasil yang ingin dicapai dalam dunia politik, sedangkan pemilihan sarana berkaitan dengan cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perilaku politikus menyangkut tindakan dan sikap moral yang ditunjukkan oleh mereka dalam menjalankan tugas politik mereka.¹⁴ Dalam konteks etika politik Islam, nilai-nilai akhlak politik diambil dari wahyu yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Etika politik Islam memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip moral yang tertuang dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, ketika menghadapi realitas sosial yang muncul, legitimasi atas realitas tersebut harus jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika politik Islam.

Hal ini berarti bahwa setiap tindakan politik harus direfleksikan dalam cahaya nilai-nilai moral dan etika Islam yang berkaitan

¹² H Kharisman, *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi: Pendasaran Filosofis Bagi Relasi Sains, Filsafat, dan Agama* (Jakarta Selatan: Sadra Press, 2015), 67.

¹³ Darsono dan Clara, Program Studi, and Magister Ilmu, *Patologi Pembangunan Etika Politik Pascareformasi Dalam Perspektif Postrukturalis - Hipersimeotik*. Vol. 3, (2020), 67-82.

¹⁴ Rahmat Hidayat dan Suwanto, 'Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia', 8311 (2020), 124-41 <<https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4469>>.

dengan keadilan, kejujuran, integritas, dan kesejahteraan umum. Realitas politik yang muncul haruslah diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan demikian, Etika politik Islam menekankan bahwa legitimasi dalam dunia politik harus senantiasa dipandu oleh nilai-nilai moral yang bersumber dari wahyu Allah. Ini mengharuskan para politikus untuk bertindak dengan integritas dan taat pada ajaran agama, sehingga memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang mereka ambil adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip etika politik Islam yang ditentukan.¹⁵

Dapat kita simpulkan sampai sejauh ini Partai Amanat Nasional yang merupakan salah satu partai Islam di Indonesia memiliki etika yang sesuai dengan perspektif Al-Farabi. Melalui kebijakan yang diperjuangkan partai amanat nasional yang cenderung mengutamakan rahmat bagi alam semesta yang tertuang dalam AD/ART, sama seperti halnya dengan pemikiran Al-Farabi tentang bagaimana manusia ini hidup tidak bisa secara individu tetapi manusia sebagai makhluk sosial jadi kepentingan sosial merupakan titik tertinggi dalam perjuangan suatu sistem politik dalam mencapai negara yang ideal. Sementara untuk Partai Amanat Nasional itu sendiri memiliki dampak yang positif dampak tersebut merupakan konsistensi dari suara yang didapatkan selama 6 kali pemilu dilaksanakan secara terbuka pasca era reformasi.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian skripsi tersebut adalah untuk menganalisis etika politik Partai Amanat Nasional (PAN) dari perspektif Al-Farabi. Peneliti akan menggunakan studi literatur terhadap karya-karya Al-Farabi yang berkaitan dengan etika politik. Metode *library research* akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait. Peneliti akan menganalisis pandangan Al-Farabi tentang etika politik dan bagaimana pandangan ini dapat diterapkan dalam konteks Partai Amanat Nasional.

Beberapa aspek yang mungkin diteliti dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip etika politik yang diusulkan oleh Al-Farabi, nilai-nilai politik yang harus dijunjung tinggi dalam pandangan Al-Farabi, dan bagaimana pandangan Al-Farabi dapat diterapkan dalam kebijakan dan praktek politik Partai Amanat Nasional.

¹⁵ Irvan Tasnur, "Akar dan Perkembangan Konservatisme Islam Dalam Perpolitikan Indonesia," *Jurnal Review Politik* 9, no. 1 (2019): 50–71.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang etika politik Partai Amanat Nasional, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori politik dan pemikiran Al-Farabi dalam konteks politik modern.

C. Rumusan Masalah

Berikut adalah tiga rumusan masalah untuk judul skripsi Etika politik Partai Amanat Nasional perspektif Al-Farabi:

1. Bagaimana konsep etika politik dalam pandangan Al-Farabi?
2. Bagaimana etika politik Partai Amanat Nasional perspektif Al-Farabi?
3. Bagaimana Partai Amanat Nasional menerapkan prinsip-prinsip etika politik Al-Farabi dalam tindakan politiknya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep etika politik dalam perspektif Al-Farabi.
2. Untuk mengetahui etika politik yang diterapkan Partai Amanat Nasional.
3. Untuk mengetahui Partai Amanat Nasional dalam menerapkan prinsip-prinsip etika politik Al Farabi dalam dan tindakan politiknya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khasanah penelitan terhadap Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus.
 - b. Diharapkan dapat memberikan paradigma keilmuan terhadap politik Islam khususnya mengenai etika politik islam perspektif Al-Farabi.
 - c. Diharapkan menjadi kajian kritis terhadap etika politik Partai Amanat Nasional melalui perspektif Al-Farabi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti sebagai suatu pengalaman dalam proses belajar dan kegiatan penelitian ditujukan untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana.
 - b. Penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi kepada akademisi dan peneliti dalam mengembangkan literatur tentang etika politik dan pemikiran Al-Farabi. Dengan

menggali dan menganalisis pandangan Al-Farabi secara kritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang etika politik dalam konteks Islam dan filsafat politik secara umum.

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi calon pemimpin politik, aktivis, dan pemikir politik dalam memahami nilai-nilai etika politik yang dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik. Dengan mengetahui perspektif Al-Farabi, para pemimpin dan praktisi politik dapat memperkuat pijakan etis dalam menjalankan tugas politik mereka.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berjudul “Etika Politik Partai Amanat Nasional Perspektif Al-Farabi” terdiri dari lima bab. Pertama, pendahuluan tentang latar belakang yang berisikan argumentasi logis tentang penelitian etika politik Partai Amanat Nasional perspektif Al-Farabi dilakukan baik secara akademik teoritik dan praktis untuk memecahkan masalah (*problem solving*). Fokus penelitian yang berisi apa yang menjadi perhatian utama penelitian, yaitu obyek kajian khusus dalam penelitian, rumusan masalah, masalah yang akan dijawab melalui proses penelitian tujuan penelitian ditujukan untuk menjawab problematika penelitian, manfaat penelitian Manfaat Penelitian berisi kontribusi penelitian skripsi yang diharapkan baik secara akademik dan implikasi praktis. Manfaat penelitian merupakan konsekuensi logis dari tujuan penelitian, sehingga manfaat penelitian harus koheren dengan tujuan penelitian. dan sistematika penulisan.

Kerangka teori adalah sebagai penyusun fakta-fakta yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, karena itu kerangka teori berfungsi sebagai pengolahan, pengumpulan, penganalisis serta prediksi dalam melakukan kegiatan penelitian khususnya karya ilmiah Berdasarkan pengertiannya, maka tujuan utama dari adanya tinjauan pustaka dalam penelitian adalah untuk menghindari kesamaan hasil penelitian, sehingga terjadi pemborosan dan kesiasiaan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menyajikan beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian untuk keperluan tinjauan pustaka, dengan harapan tidak adanya pemborosan penelitian yang pada akhirnya dapat membentuk kerangka berpikir dalam penelitian etika politik pada masa nasional perspektif Al Farabi.

Bab III menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang di mana di dalamnya langkah-langkah bagaimana kita

menggunakan pelaksanaan penelitian yang bersifat teknis dan aplikatif. Sementara untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur yang berbasis pada pengumpulan data melalui literatur yang ada. jurnal karya ilmiah lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. Selanjutnya pada bab IV berisi tentang gambaran tentang etika Partai Amanat Nasional, yang kemudian kita deskripsikan data-data hasil penelitian yang kita temukan melalui kajian teori perspektif Al-Farabi, pasca menemukan deskripsi data-data yang kita dapat maka kita akan menggunakan analisis Al-Farabi untuk semakin memperjelas temuan yang kita dapatkan dalam penelitian kali ini hasil-hasil yang didapatkan dari serangkaian penelitian yang telah dilaksanakan. Bab V berisikan tentang penutup di mana dalam bab ini akan menjabarkan tentang bagaimana penelitian ini semakin mendukung penelitian terdahulu atau memberikan antitesa terhadap penelitian terdahulu. Untuk selanjutnya saran diperlukan agar penelitian selanjutnya semakin melengkapi dari penelitian yang saya kerjakan simpulan dan saran-saran terhadap penelitian etika politik Partai Amanat Nasional perspektif Al-Farabi.